

ABSTRAK

Penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin di Indonesia sudah marak terjadi, kejadian ini mengakibatkan besar kemungkinan adanya penyalahgunaan obat tersebut oleh para pelaku. Ketamin sendiri dalam dunia kedokteran biasa digunakan sebagai obat anastesi, namun banyak pihak yang menyalahgunakannya. Seseorang yang memiliki, membawa, mengekspor, impor, harus memiliki izin dari pihak yang berwenang dan seseorang tidak bisa memiliki, atau membawa ketamin dalam jumlah yang banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan untuk mengetahui juga memahami penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau di tujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari data kepustakaan.

Hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penyelundupan sediaan obat farmasi jenis ketamin tanpa izin, kurang relevan dengan hanya melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, padahal sudah bisa diambil kesimpulan bahwa obat jenis ketamin ini mempunyai dampak yang sama dengan penggunaan narkoba jenis psiktropika golongan 2 dan narkotika golongan 1. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum atau penjatuhan hukuman bagi para pelaku penyelundupan obat jenis ketamin daripihak yang berwenang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum pidana, Penyelundupan Sediaan Farmasi Jenis ketamin, Tanpa Izin

ABSTRACT

The smuggling of pharmaceutical drug types of ketamine in Indonesia has been rampant, this incident has resulted in the possibility of abuse of these drugs by the perpetrators. Ketamine itself in medicine is commonly used as anesthetic medicine, but many people abuse it. Someone who owns, carries, exports, imports, must have permission from the authorities and someone cannot own, or carry a large amount of ketamine.

This study aims to find out and understand the regulation regarding smuggling of pharmaceutical drug types of ketamine without permission associated with Law No. 36 concerning Health and to also understand law enforcement against perpetrators of smuggling of pharmaceutical drugs for ketamine without permission linked to Law No. 36 about health.

This study uses a normative juridical method, namely library research or document study carried out or directed only to written regulations or other legal material. This study also uses data analysis methods that are in accordance with descriptive research is to use a qualitative approach, namely the analysis of data revealing and retrieving the truth obtained from library data.

The results of the study that the law enforcement imposed on the perpetrators of smuggling of pharmaceutical drugs for the type of ketamine without permission, is not relevant by only looking at Law No. 36 of 2009 concerning Health, even though it can be concluded that the ketamine drug has the same effect as group 2 psychotropic drugs and class 1 narcotics 1. Here, which is still weak, is law enforcement or sentencing for perpetrators of ketamine-type drugs from the authorities.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Smuggling of Pharmaceutical Preparations of Ketamine, Without Permit*